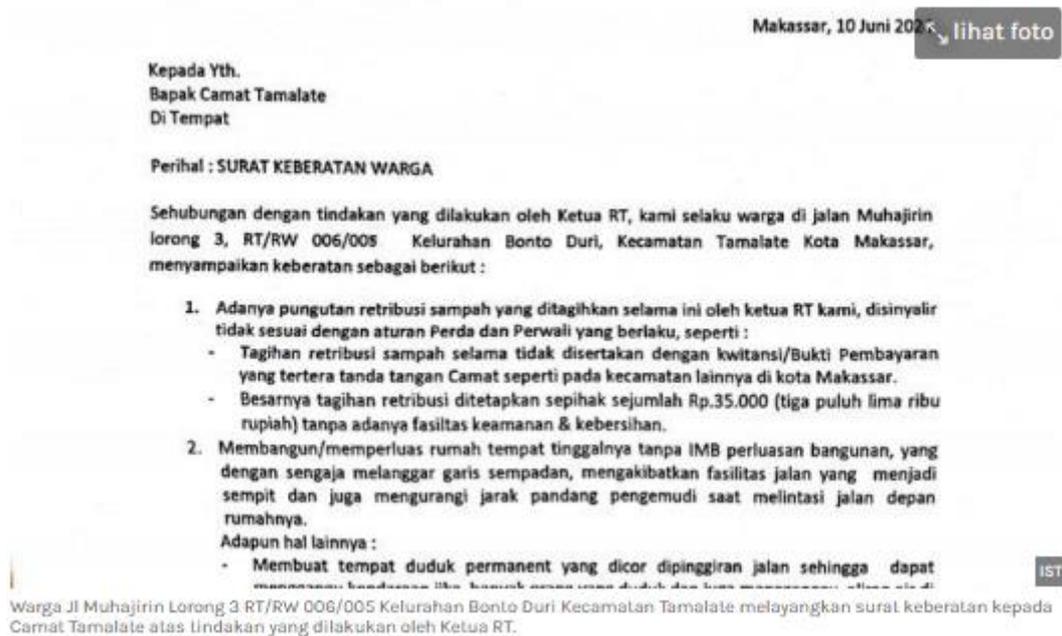


Pendapatan Retribusi Daerah- Ketua RT Tamalate Makassar Pungut Retribusi Sampah Rp 35 Ribu, Warga Kirim Surat Keberatan



Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/06/29/ketua-rt-tamalate-makassar-pungut-retribusi-sampah-rp-35-ribu-warga-kirim-surat-keberatan>

Warga Jl Muhajirin Lorong 3 RT/RW 006/005 Kelurahan Bonto Duri Kecamatan Tamalate, [Makassar](#), [Sulawesi Selatan](#) melayangkan surat keberatan kepada Camat Tamalate atas tindakan [Ketua RT](#).

Dalam surat tersebut warga mengeluhkan pungutan retribusi sampah yang ditetapkan oleh [Ketua RT](#) secara sepihak.

Ketua RT mematok retribusi sampah per bulan di angka Rp 35 ribu

Penetapan tersebut dinilai tidak sesuai dengan peraturan daerah maupun peraturan wali kota yang berlaku.

Keluhan ini disampaikan salah satu warga, Muh Ryanthoro.

Ia menyampaikan, [Ketua RT](#) berdalih bahwa iuran sampah sebesar Rp 35 ribu berdasarkan hasil rapat koordinasi antara RT/RW dan lurah setempat.

"Di grup wa disampaikan seperti itu oleh Ketua RT. Warga kemudian menanyakan agar rincian iuran Rp 35 ribu tersebut diperjelas," ucap Muh Ryanthoro kepada Tribun Timur, Jumat (28/6/2024).

Tagihan retribusi sampah selama ini juga tidak disertakan dengan kuitansi atau bukti pembayaran yang sah.

Hal ini sudah pernah dikonfirmasi langsung kepada Sekretaris Camat Tamalate, sesuai keterangannya, kecamatan tidak pernah memberi instruksi untuk menaikkan iuran sampah.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

"Makanya disinyalir terjadi sesuatu, apakah RTnya yang bermain atau memang berdasarkan instruksi pak lurah," ujarnya.

Masalah kedua yang dikeluhkan oleh warga, terkait bangunan milik [Ketua RT](#) yang diduga memperluas rumahnya tanpa IMB perluasan bangunan.

Ketua RT bersangkutan diduga dengan sengaja melanggar garis sempadan yang mengakibatkan akses jalan warga menjadi sempit.

"Perluasan rumah juga mengurangi jarak pandang pengemudi saat melintas di depan rumah [Ketua RT](#) tersebut," ungkapnya.

Ketua RT juga membuat tempat duduk permanen dicor di pinggir jalan sehingga mengganggu kendaraan yang melintas serta mengganggu aliran air drainase.

Yang bersangkutan juga membuat kandang kucing di atas drainase.

"Jangan mentang-mentang dia RT baru dilindungi, karena dia RT mungkin dia bisa membangun seenaknya," keluhnya.

"Sudah pernah ditegur tahun lalu, tapi tetap membangun," sambungnya.

Pasca surat keberatan tersebut dikirim ke Camat pada 10 Juni lalu, pihaknya baru mendapat respon pagi tadi dengan diundang untuk menghadiri mediasi.

"Saya diundang sendiri, kenapa warga lain tidak? Kenapa juga undangannya mediasi sementara saya tidak berseteru dengan [Ketua RT](#) nya, apa yang perlu dimediasikan? kami butuh penjelasan terkait retribusi sampah tadi," tegasnya.

600 Lebih [Ketua RT/RW](#) Terancam Dicotot, Berapa Insentif Diterima Tiap Bulan?

Wali Kota [Makassar](#) Danny Pomanto bakal memecat sekitar 600-700 Pj [Ketua RT/RW](#) dalam waktu dekat.

Bukan tanpa sebab, ratusan Pj [Ketua RT/RW](#) tersebut dianggap tak mampu lagi melayani masyarakat.

Di samping itu, beberapa dari mereka dianggap malas bahkan sampai tilep iuran sampah.

Lantas berapa sebenarnya insentif Pj [Ketua RT/RW](#) di [Makassar](#)?

Pj Sekretaris Daerah Kota [Makassar](#), Firman Hamid Pagarra menjelaskan, kenaikan insentif Pj RT/RW akan dihitung mulai Februari 2024.

Adapun insentif Pj RT/RW bertambah Rp200 ribu.

Total diterima kini Rp1,2 juta tiap bulannya.

"Jadi pencairan insentif untuk bulan Januari masih pakai yang lama. Kalau untuk Februari dan Maret pakai Perwali yang baru," ungkap Firman saat ditemui di ruang kerjanya, di Kantor Wali Kota [Makassar](#) lantai 2, Jalan Ahmad Yani, Selasa (26/3/2024).

Sebelumnya, Wali Kota [Makassar](#) Danny Pomanto akan mengevaluasi Penjabat (Pj) [Ketua RT/RW di Makassar, Sulawesi Selatan](#).

Evaluasi Pj RT/RW akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Segera dievaluasi. Akan ada (pergantian). Karena RT/RW ternyata banyak tidak aktif. Saya baru dapat (informasinya)," beber Danny Pomanto di Balai Kota [Makassar](#) Jl Ahmad Yani, Rabu (19/6/2024).

Selain karena tidak aktif, banyak juga RT/RW mengundurkan diri, bahkan ada tersandung masalah hukum.

Danny membeberkan, beberapa oknum RT/RW bahkan menyelewengkan tagihan sampah masyarakat.

"Ada yang mengundurkan diri, ada yang bermasalah hukum, ada yang malas, ada beberapa yang mohon maaf, tilep uang sampah. Diberhentikan itu. Harus diberhentikan," katanya.

Kisaran RT/RW berkinerja rendah hingga tidak aktif mencapai ratusan orang.

Hitungan kasarnya, satu kecamatan sekitar 40 sampai 50 orang diidentifikasi bermasalah.

"Banyak (yang bermasalah) saya kalau tadi malam laporannya anggaplah 50-40 orang dikali 15 (kecamatan)," jelasnya.

Jika dikalkulasi, total Pj RT/RW bakal dievaluasi mencapai 600-750 orang.

Danny mengaku telah mengantongi nama-nama RT/RW yang berpotensi diganti.

Dalam proses evaluasi tersebut, ia akan memanggil langsung yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi secara langsung.

"Tapi nama-nama sudah ada. Saya evaluasi lagi. Panggil orangnya satu-satu. (Panggil) Semua termasuk yang tidak aktif. Supaya jangan sampai salah," ujarnya.

Setelah pergantian tersebut, Danny Pomanto akan memaksimalkan kembali kerja-kerja RT/RW.

Sebelumnya, Wali Kota [Makassar](#) Danny Pomanto akan mengevaluasi Penjabat (Pj) [Ketua RT/RW di Makassar, Sulawesi Selatan](#).

Evaluasi Pj RT/RW akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Segera dievaluasi. Akan ada (pergantian). Karena RT/RW ternyata banyak tidak aktif. Saya baru dapat (informasinya)," beber Danny Pomanto di Balai Kota [Makassar](#) Jl Ahmad Yani, Rabu (19/6/2024).

Selain karena tidak aktif, banyak juga RT/RW mengundurkan diri, bahkan ada tersandung masalah hukum.

Danny membeberkan, beberapa oknum RT/RW bahkan menyelewengkan tagihan sampah masyarakat.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

"Ada yang mengundurkan diri, ada yang bermasalah hukum, ada yang malas, ada beberapa yang mohon maaf, tilep uang sampah. Diberhentikan itu. Harus diberhentikan," katanya.

Kisaran RT/RW berkinerja rendah hingga tidak aktif mencapai ratusan orang.

Hitungan kasarnya, satu kecamatan sekitar 40 sampai 50 orang diidentifikasi bermasalah.

"Banyak (yang bermasalah) saya kalau tadi malam laporannya anggaph 50-40 orang dikali 15 (kecamatan)," jelasnya.

Jika dikalkulasi, total Pj RT/RW bakal dievaluasi mencapai 600-750 orang.

Danny mengaku telah mengantongi nama-nama RT/RW yang berpotensi diganti.

Dalam proses evaluasi tersebut, ia akan memanggil langsung yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi secara langsung.

"Tapi nama-nama sudah ada. Saya evaluasi lagi. Panggil orangnya satu-satu. (Panggil) Semua termasuk yang tidak aktif. Supaya jangan sampai salah," ujarnya.

Setelah pergantian tersebut, Danny Pomanto akan memaksimalkan kembali kerja-kerja RT/RW.

Adapun dalam hal tersebut, Siap-siap! Iuran sampah di Kota [Makassar](#) bakal naik.

Pemerintah Kota [Makassar](#) akan memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari retribusi sampah.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, jumlah pendapatan retribusi sampah setiap tahunnya diangka Rp35 miliar.

Hal ini tak sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah persampahan.

Plt Kepala DLH Kota Makassar Ferdi Mochtar mengatakan subsidi setiap tahunnya untuk penanganan sampah mencapai Rp200 miliar.

Itu mencakup pengadaan hingga pemeliharaan infrastruktur sampah atau transportasi dan alat angkut sampah.

Anggaran Rp200 miliar itu juga sudah termasuk biaya untuk membayar insentif petugas sampah.

Karenanya, Pemkot [Makassar](#) akan melakukan penyesuaian terhadap retribusi sampah.

Sebab, nilai yang ada sekarang ini dianggap sudah tidak relevan.

"Sekarang kota sedang godok perwalinya. Sudah di bagian hukum, dan kita akan bahas teknis bersama tim ahli hukum Pemerintah [Makassar](#)," ucap [Ferdie Mochtar](#), Selasa (25/6/2024).

Kata Ferdi, penyesuaian ini harus dilaksanakan sebab merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada 5 Januari lalu.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Rancangan peraturan wali kota tersebut kata Ferdi juga telah dipaparkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Perwali ini kami sudah presentasikan di Kemendagri, karena ada keterkaitan dengan retribusi dan angka-angka, itu sudah kita diskusikan sampai di mana dapatkan turunan-turunan, mulai misalnya di tingkat rumah tangga miskin, menengah ke atas yang masing-masing berbeda tarif," paparnya.

Ferdi mencontohkan, retribusi sampah untuk keluarga miskin nilainya Rp25 ribu.

Hal tersebut disesuaikan dengan tarif listriknya, kalau misalnya Rp 900 watt ke bawah, nilainya Rp25 ribu per bulan.

Berdasarkan perwali yang berlaku sebelumnya, tagihan sampah untuk keluarga miskin Rp16 ribu per bulan.

"Jadi ada kenaikan kurang lebih sekitar Rp9.000, tapi kita tetap melihat perkembangan ditingkat masyarakat, makanya nanti ada perbaikan-perbaikan, tentunya kita akan rapatkan dan diskusikan kembali," ulasnya.

"Tapi kita juga melihat seberapa besar kontribusi pelayanan kita terhadap penanganan persampahan yang selama ini banyak di subsidi oleh pemerintah," sambungnya.

Terpisah, Wali Kota [Makassar Danny Pomanto](#) menyampaikan akan melakukan efisiensi terhadap seluruh armada sampah.

Danny merencanakan pembelian armada sampah listrik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024.

Danny berharap dengan menggunakan armada listrik, tidak ada lagi kebocoran anggaran operasional, khususnya dalam pembelian bahan bakar minyak.

Sehingga tidak ada lagi alasan tidak mengoperasikan armada karena tidak ada BBM.

Selain itu, untuk menghindari kebocoran iuran atau retribusi sampah, pembayarannya akan menggunakan aplikasi Pakinta'.

"Jadi tidak adami lagi yang bisa disalahgunakan. Langsung dibayar pakai Qris menggunakan

Sumber Berita:

1. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/29/ketua-rt-tamalate-makassar-pungut-retribusi-sampah-rp-35-ribu-warga-kirim-surat-keberatan>
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/25/siap-siap-iuran-sampah-di-makassar-bakal-naik-warga-miskin-rp25-ribu-per-bulan>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.